

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berkembangnya ilmu secara cepat memiliki dampak signifikan di sektor pemerintahan dan swasta. Keduanya saling bersaing untuk meningkatkan kualitas kerja di lingkungannya. Dinamika organisasi tidak terlepas dari interaksi dengan organisasi lain dan lingkungannya. Oleh karena itu, akses dan pertukaran informasi menjadi kebutuhan utama.

Setiap perusahaan memiliki bagian komunikasi yang bertugas untuk mempromosikan perusahaan kepada masyarakat luas. Bagian komunikasi ini memiliki peran penting dalam kegiatan pemerintahan, seperti menyediakan informasi publik, memperkuat hubungan internal antara karyawan, menjaga hubungan baik dengan media, dan lain sebagainya.

Peran humas sangat strategis dan penting dalam organisasi, terutama di pemerintahan. Humas tidak hanya berfungsi sebagai komunikasi, tetapi juga berfungsi sebagai penghubung untuk menciptakan lingkungan yang baik untuk mencapai solusi yang bermanfaat, sehingga meningkatkan citra institusi pemerintah. Oleh karena itu, model komunikasi dua arah yang simetris adalah praktik humas pemerintahan yang paling ideal.

Humas lebih sering diasosiasikan dengan perusahaan swasta karena dalam praktiknya, kinerja Humas di sektor swasta cenderung lebih terlihat dan menonjol. Sementara itu, Humas yang beroperasi di lembaga pemerintah sering kali dinilai kurang proaktif dibandingkan dengan perusahaan swasta. Di lembaga pemerintah, Humas cenderung bersifat reaktif, di mana humas berperan sebagai penyampai informasi kepada publik terkait lembaga tersebut. Proses penyampaian informasi kepada publik di lembaga pemerintah seringkali terhambat oleh birokrasi yang kompleks dan harus melalui persetujuan dari atasan, sehingga cakupan kerja humas menjadi terbatas.

Dewan Perwakilan Daerah berperan sebagai perwakilan politik dalam DPR RI dan sebagai representasi teritorial. Pemerintah Indonesia terus berusaha untuk mereformasi sistem ketatanegaraan agar menjadi lebih efisien. Sebelumnya, Dewan Perwakilan Daerah memiliki kewenangan yang terbatas, namun kini didorong untuk lebih aktif dalam memajukan kepentingan daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Dewan Perwakilan Daerah memiliki kewenangan untuk mengawasi dan mengurus urusannya sendiri sesuai dengan prinsip otonomi dan tugas pembantuan. Peningkatan kewenangan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan, memberdayakan masyarakat, dan mendorong partisipasi masyarakat, yang semuanya akan mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat.

Dalam memberikan informasi kepada masyarakat, Humas Dewan Perwakilan Daerah berupaya menyajikan informasi secara cermat dan komprehensif kepada masyarakat. Informasi seputar Dewan Perwakilan Daerah sering kali disebar melalui situs web resmi www.dpd.go.id dan platform media lainnya Instagram, Facebook, dan Twitter dengan *username* @dpdri. Dengan menggunakan media sosial, masyarakat memiliki kesempatan untuk memberikan tanggapan dan menyebarkan informasi secara luas. Sehingga media sosial dapat meningkatkan efisiensi dalam proses publikasi.

Peran humas pemerintah mencakup menyampaikan kebijakan dan informasi pemerintah kepada publik. ini dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Teknik humas pemerintah tidak berbeda dengan teknik humas di bidang lain, seperti komunikasi dan informasi.

Persepsi masyarakat terhadap Dewan Perwakilan Daerah cukup besar, namun kinerjanya terkadang dianggap di bawah standar. Banyak masyarakat memandang Dewan Perwakilan Daerah sebagai advokat daerah yang harus membela kepentingan dan tujuan masyarakat di daerahnya. Sayangnya, opini publik menunjukkan bahwa Dewan Perwakilan Daerah belum mampu secara efektif mempengaruhi kebijakan nasional yang benar-benar mempertimbangkan

kepentingan daerah. Selain itu, masih terdapat anggapan bahwa kinerja sebagian anggota Dewan Perwakilan Daerah tidak sesuai standar pemilih yang memilihnya.

Meskipun masyarakat sering menilai Dewan Perwakilan Daerah sebagai organisasi yang asal-asalan, namun Dewan Perwakilan Daerah sejatinya banyak memikirkan dan memperhatikan kepentingan masyarakat. Banyak anggota Dewan Perwakilan Daerah yang berupaya keras untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi konstituennya dan secara aktif berupaya mewakili tujuan daerahnya di tingkat federal. Dewan Perwakilan Daerah telah melakukan sejumlah inisiatif dan program agar kebutuhan masyarakat terpenuhi dan pembangunan daerah tidak terabaikan. Selain itu, Dewan Perwakilan Daerah mengawasi pelaksanaan undang-undang, anggaran, dan kebijakan pemerintah untuk memastikan mereka lebih melayani kepentingan daerah. Dewan Perwakilan Daerah terus berupaya menjalankan tugasnya seefektif mungkin demi kesejahteraan masyarakat yang diwakilinya, meski seringkali pengabdian tersebut kurang terlihat di mata masyarakat luas.

Dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah memegang peranan penting, namun sayangnya, tidak banyak yang mengetahui instansi ini di kalangan masyarakat umum. Banyak masyarakat yang belum mengetahui peran dan partisipasi Dewan Perwakilan Daerah dalam perjuangan nasional untuk kepentingan daerah. Menyadari hal tersebut, Humas Dewan Perwakilan Daerah terus berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan keberadaan dan fungsi Dewan Perwakilan Daerah dengan terus berupaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan pentingnya Dewan Perwakilan Daerah melalui berbagai strategi komunikasi. Kurangnya kesadaran dalam masyarakat menuntut Humas Dewan Perwakilan Daerah untuk selalu aktif memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai peran dan fungsinya.

1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Magang

Praktik kerja magang merupakan hal penting bagi mahasiswa untuk memenuhi syarat kurikulum dalam menyelesaikan pendidikan sarjana Ilmu Komunikasi. Selain itu, tujuannya adalah untuk memiliki pengalaman kerja humas

pemberitaan di Dewan Perwakilan Daerah dengan cara menerapkan ilmu-ilmu yang telah dipelajari di bangku kuliah dan diterapkan langsung di lapangan.

1.3 Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

1.3.1 Waktu Pelaksanaan Kerja Magang

Praktik kerja magang yang dilaksanakan selama di Sekertariat Jenderal DPD RI Kota Jakarta Pusat yaitu selama kurang lebih 640 jam kerja atau empat bulan yang dihitung mulai dari tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan 24 Mei 2024. Praktik kerja magang berlangsung dari selama hari kerja pukul 08.00 hingga pukul 16.30 WIB.

1.3.2 Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

Berikut Langkah-langkah sebelum dimulainya praktik kerja magang di bagian Humas Pemberitaan Dewan Perwakilan Daerah, antara lain:

- a. Mencari informasi mengenai lowongan magang dari berbagai platform pencari kerja seperti LinkedIn, Jobstreet, Kalibrrr, dan Indeed.
- b. Mencoba mengajukan praktik kerja magang kepada DPD RI.
- c. Mengajukan KM-01 sebagai persyaratan praktik kerja magang dan meminta persetujuan dari Kepala Program Studi Ilmu Komunikasi.
- d. Mendapatkan surat pengantar praktik kerja magang KM-02 dan mengirimkan surat tersebut kepada DPD RI.
- e. Penulis mendapatkan panggilan penerimaan praktik kerja magang di DPD RI pada 5 Februari 2024 dan menghadap ke bagian kepegawaian.
- f. Kemudian penulis ditempatkan di bagian pemberitaan Dewan Perwakilan Daerah selama 4 bulan sampai 24 Mei 2024 dan melanjutkan mengisi KM-03 sampai selanjutnya.
- g. Menyusun laporan di Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dan melakukan bimbingan bersama dosen yang sudah ditentukan.